

TINGKAT, POLA, DAN DETERMINAN USIA KAWIN WANITA DAN PRIA*

Sukamdi
Susi Eja Yuarsi
Wini Tamtiari**

Abstract

This study is conducted in three provinces, West Java, South Sulawesi and West Nuca Tenggara, which represent different cultural background, using secondary data namely marital verification forms (MVF). From methodological point of view this study finds that MVF can be used as data sources in analysing age of marriage inspite of using population census or national surveys.

The result of previous studies have not been confirmed by this study. Mean age at first marriage in West Java is not the lowest, but is West Nusa Tenggara. In addition South Sulawesi is always the highest. Cultural backgrounds such as dowery in South Sulawesi which is the highest among the provinces and the tradition of elopement in West Nusa Tenggara are very important in explaining the variation of age at first marriage. However education has also an important role as independent variable for age at first marriage.

Pendahuluan

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa studi perkawinan termasuk usia perkawinan, perceraian, dan perkawinan ulang merupakan ruang gerak penelitian antropologi. Anggapan ini sebetulnya tidak seluruhnya benar, mengingat studi antropologi perkawinan lebih menitik

beratkan pada masalah atau aspek ritual dan nilai-nilai tradisionalnya. Dari sisi lain, studi antropologi seringkali belum mengaitkan faktor atau variabel kependudukan.

Usia kawin sangat menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan studi fertilitas. Davis dan Blake (1956),

* Tulisan ini didasarkan atas penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

** Drs. Sukamdi, M.Sc. adalah staf peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, dan staf pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dra. Susi Eja Yuarsi dan Dra. Wini Tamtiari adalah asisten peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

misalnya, mengemukakan bahwa faktor usia kawin pertama sangat penting sebagai variabel antara, yaitu variabel yang secara langsung mempengaruhi fertilitas. Untuk negara-negara yang program keluarga berencananya belum secara menyeluruh dilaksanakan, usia kawin pertama merupakan faktor yang dominan dalam menerangkan variasi fertilitas (BPS, 1980). Dalam kasus semacam ini, usaha untuk menurunkan angka fertilitas dapat dilakukan melalui penundaan usia kawin. Hal itu paling tidak juga tercermin dalam tulisan Malthus. Untuk mengendalikan jumlah penduduk, Malthus tidak menganjurkan pemakaian alat kontrasepsi yang sudah dikenal pada zamannya. Melalui bukunya yang diterbitkan pada tahun 1798, ia mengemukakan bahwa satu-satunya cara untuk menekan angka fertilitas adalah dengan menunda perkawinan (*moral restrain*).

Pendapat Malthus dewasa ini memperoleh dukungan dari para ahli kependudukan. Indonesia yang telah berhasil dalam melaksanakan keluarga berencana bukan berarti mengabaikan variabel usia kawin dalam rangka menurunkan angka fertilitas. Usaha menurunkan angka fertilitas dengan hanya menggantungkan diri pada ibu-ibu berstatus kawin akan mengalami kesukaran tanpa upaya mengubah pola perkawinan. Artinya usaha untuk menurunkan angka fertilitas dengan keluarga berencana perlu didukung oleh usaha meningkatkan usia kawin. Paling tidak dengan peningkatan usia kawin, maka masa usia subur menjadi lebih pendek.

Karena hal-hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi usia kawin sangat perlu dikaji. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usia kawin dapat dilakukan intervensi kebijaksanaan dalam rangka menurunkan angka kelahiran. Di samping itu, selama beberapa tahun terakhir ini terjadi kekosongan dalam studi usia kawin sehingga informasi yang paling baru mengenai hal tersebut sangat sulit didapat. Oleh karena itu, studi mengenai usia kawin pertama sangat dibutuhkan.

Dari sisi lain, pendewasaan usia kawin tidak hanya bermanfaat dalam menurunkan angka fertilitas, tetapi hal tersebut juga berkaitan dengan aspek sosial psikologis, kesehatan, dan ekonomi. Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam siklus hidup wanita dan juga pria. Perubahan dari status lajang menjadi "kawin" mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan selanjutnya, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat materil maupun nonmateril. Sebagai ilustrasi, perkawinan usia muda biasanya berkaitan dengan ketidaksiapan pasangan secara sosial, psikologis, dan ekonomi. Akibatnya, seringkali kawin usia muda membawa dampak terhadap kesehatan ibu, terutama saat melahirkan dan juga kesehatan bayi dan anak. Dalam skala makro, daerah yang mempunyai rata-rata usia kawin pertama muda, pertumbuhan rumah tangganya relatif lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang mempunyai rata-rata usia kawin pertama lebih tua. Hal ini berakibat terhadap penyediaan rumah dan

fasilitas rumah tangga lainnya. Memperhatikan penjelasan tersebut, maka usaha untuk meningkatkan usia kawin tidak hanya bermanfaat dari segi demografis, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas.

Masalah lain yang berkaitan dengan studi mengenai usia kawin adalah pemanfaatan sumber data. Sejauh ini analisis data sekunder untuk studi tersebut biasanya menggunakan data sensus maupun survai (BPS, 1980). Data yang langsung berkaitan dengan perkawinan, baik yang ada di KUA maupun Catatan Sipil belum atau bahkan sangat jarang dimanfaatkan. Dengan demikian penggunaan data tersebut mempunyai manfaat yang cukup tinggi sebagai *academic exercise*.

Sejauh ini studi tingkat dan pola usia kawin di Indonesia relatif masih terbatas. Demikian juga halnya dengan studi yang menekankan pada analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi usia kawin. Di samping itu, kebijaksanaan untuk pendewasaan usia kawin yang telah dilaksanakan selama ini masih belum mencapai sasaran yang diharapkan, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini antara lain disebabkan adanya banyak variasi rata-rata usia kawin terendah dari masing-masing daerah yang berkaitan dengan norma atau budaya masyarakat serta kondisi daerah setempat. Demikian juga halnya pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap usia kawin tidak sama di berbagai daerah atau propinsi.

Kenyataan lain yang berkembang selama ini adalah bahwa studi mengenai usia kawin lebih ditekankan pada wanita karena secara langsung berkaitan dengan fertilitas. Perlu

dicatat bahwa usia kawin pria secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi fertilitas. Pendewasaan usia kawin pria akan mempengaruhi kedewasaan rumah tangga, yang berarti pula akan meningkatkan stabilitas rumah tangga. Hal ini akan menyebabkan turunnya tingkat perceraian sehingga perkawinan ulang akan berkurang dan akibatnya akan menurunkan tingkat fertilitas.

Oleh karena itu, studi mengenai tingkat, pola, dan determinan usia kawin baik wanita maupun pria menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan masukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pendewasaan usia kawin.

Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan salah satu lembaga penting bagi manusia. Melalui perkawinan terbentuk keluarga, yakni salah satu unit sosial yang terpenting dalam masyarakat. Salah satu aspek dari studi perkawinan yang penting adalah usia kawin, terutama dalam kaitannya dengan variabel demografi. Usia kawin merupakan masalah sosial dan perilaku manusia yang perlu mendapat perhatian sebab hal itu erat kaitannya dengan fertilitas.

Perhatian para ahli demografi terhadap bidang studi perkawinan mulai muncul setelah perang dunia kedua berakhir, yaitu pada saat terjadi penurunan usia kawin di negara-negara maju. Bloom dan Reddy (1984) mengatakan bahwa usia kawin berpengaruh kuat pada fenomena demografi, sosial, dan ekonomi. Sebaliknya, usia kawin juga

dipengaruhi oleh variabel demografi sosial dan ekonomi. Biro Pusat Statistik Indonesia (1980) mengungkapkan argumen dari beberapa ahli tentang mengapa di negara-negara maju telah terjadi penurunan usia kawin. Ada anggapan yang menyebutkan bahwa penurunan usia kawin disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan ekonomi yang cukup cepat (*economic prosperity*) sehingga kesempatan untuk meneruskan sekolah maupun untuk mendapatkan pekerjaan tidak tertutup atau terhalang setelah melangsungkan perkawinan. Hal lain yang mendorong penurunan usia kawin adalah berkurangnya hambatan keuangan, baik untuk pembayaran maskawin maupun untuk jaminan hidup sesudah perkawinan. Kebalikan dari gejala usia kawin tersebut adalah gejala perceraian.

Di negara-negara maju semula jarang terjadi perceraian, tetapi sesudah tahun enam puluhan sering terjadi. Davis (1956) menyatakan bahwa gejala ini disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi, meskipun yang terjadi di Jepang adalah sebaliknya. Beberapa peneliti yang lain menyatakan bahwa gejala kenaikan persentase perceraian adalah akibat dari semakin meningkatnya kebebasan dan kemandirian wanita di satu pihak, dan di lain pihak suami atau pria masih ingin mempertahankan dominasinya.

Dixon (1971) menyatakan bahwa gejala yang terjadi di negara-negara seperti dilukiskan di atas tampaknya kurang mendapat dukungan dari penelitian di negara berkembang. Dewasa ini pembangunan sosial dan ekonomi justru merupakan penghambat perkawinan sehingga terjadi

kecenderungan kenaikan usia kawin, meskipun terjadi hal yang sebaliknya di beberapa daerah, terutama di pedesaan. Salah satu contoh yang paling jelas adalah kesempatan untuk sekolah yang semakin tinggi telah menyebabkan penundaan usia kawin karena meningkatnya keinginan penduduk untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Bogue (1969), Yaukey dan Thorsen (1971) dan Smith (1975) melaporkan bahwa faktor-faktor utama dari modernisasi seperti urbanisasi, pendidikan, dan pekerjaan menyebabkan penundaan perkawinan yang berarti faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap usia kawin pertama.

Pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an ternyata banyak perubahan dalam pola perkawinan di beberapa negara ASEAN. Hal itu tampak terutama pada kecenderungan terjadinya peningkatan rata-rata usia kawin dan kesempatan yang lebih luas bagi gadis untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam pemilihan jodoh (Jones, 1987).

Indonesia, sebagaimana negara-negara ASEAN lainnya juga mengalami peningkatan rata-rata usia kawin pertama. Pada tahun 1971 rata-rata usia kawin pertama di Indonesia tercatat 19,6 dan pada tahun 1980 adalah 20. Angka ini meningkat lagi menjadi 21,9 tahun pada tahun 1990. Sementara itu, usia kawin pertama di masing-masing propinsi pada periode 1971-1990 sangat bervariasi. Rata-rata usia kawin pertama terendah selama kurun waktu 20 tahun tersebut adalah Propinsi Jawa Barat, yaitu 18 pada tahun 1971, 18,6 pada tahun 1980, dan 20,4 pada tahun

1990. Untuk rata-rata usia kawin tertinggi di tingkat propinsi pada tahun 1971 adalah di Propinsi Bali, yaitu 23,6 tahun. Pada tahun 1980 dan 1990, rata-rata usia kawin tertinggi tercatat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 24,1 dan 24,8 tahun (BPS, 1993). Data mengenai perkembangan usia kawin tersebut bisa terlihat pada Tabel 1.

Peningkatan usia kawin tersebut tidak lepas dari usaha pemerintah, salah satunya adalah dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974

tentang usia perkawinan. Di samping itu secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi usia kawin, antara lain norma usia kawin atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Dewasa ini peneliti masalah kependudukan makin tertarik pada pengaruh faktor sosial-ekonomi, seperti tempat tinggal waktu kecil atau latar belakang tempat tinggal, pendidikan, status pekerjaan, agama, perbedaan umur suami dan istri, dan lain-lain.

Tabel 1.
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita 1971, 1980, dan 1990 menurut Propinsi

No.	Propinsi	1971	1980	1990
1.	DI Aceh	19,7	20,9	22,8
2.	Sumatra Utara	21,0	22,0	23,7
3.	Sumatra Barat	20,3	20,9	23,0
4.	Riau	20,0	21,0	22,3
5.	Jambi	18,6	19,4	21,0
6.	Sumatra Selatan	20,0	21,1	22,1
7.	Bengkulu	20,0	19,9	21,2
8.	Lampung	18,0	19,0	20,9
9.	DKI Jakarta	20,7	22,3	24,3
10.	Jawa Barat	18,0	18,6	20,4
11.	Jawa Tengah	19,1	20,0	21,5
12.	DI Yogyakarta	21,9	23,0	24,6
13.	Jawa Timur	18,9	19,6	21,3
14.	Bali	23,6	22,1	22,5
15.	NTB	20,3	21,0	21,5
16.	NTT	23,0	24,1	24,8
17.	Timer Timur	-	-	23,5
18.	Kalimantan Barat	21,5	21,3	22,0
19.	Kalimantan Tengah	20,2	20,0	21,1
20.	Kalimantan Selatan	19,4	19,8	21,8
21.	Kalimantan Timur	19,9	20,9	22,5
22.	Sulawesi Utara	23,0	22,9	23,5
23.	Sulawesi Tengah	21,0	21,5	22,2
24.	Sulawesi Selatan	21,5	22,7	24,6
25.	Sulawesi Tenggara	20,8	21,0	22,0
26.	Maluku	22,7	22,6	23,4
27.	Irian Jaya	21,5	20,0	20,9
	Indonesia	19,6	20,0	21,9

Sumber: BPS, 1993.

Penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia seperti misalnya oleh Singarimbun dan Manning (1974), serta Soeradji (1982) juga yang mendukung hipotesis-hipotesis yang dikemukakan oleh Bogue, Yaukey dan Thorsen, dan Smith, yaitu bahwa pendidikan merupakan faktor yang cukup dominan dalam menentukan usia kawin seorang gadis (Soeradji, 1982). Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa pendidikan (penyelesaian pendidikan) sering digunakan sebagai alasan untuk menunda perkawinan. Dalam kehidupan sehari-hari sering didengar alasan seorang gadis yang akan dikawinkan seperti "masih ingin sekolah terus", "biar sekolahnya tamat dulu", dan sebagainya.

Di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat tradisi menikahkan anak gadis pada usia muda. Di samping rendahnya usia kawin, di Indonesia juga terdapat kelaziman pengaturan pasangan oleh orang tua terutama bagi gadis-gadis. Dari studi di suatu daerah di Jawa Tengah, Singarimbun dan Manning (1974) melaporkan bahwa 23 persen dari perkawinan pertama yang diteliti adalah perkawinan berdasarkan pilihan orang tua. Gejala semacam ini berangsur-angsur mulai berkurang di kalangan penduduk berpendidikan lebih tinggi, meskipun persetujuan dari orang tua tetap dianggap hal yang penting dan diutamakan. Bloom dan Reddy (1984) menyatakan bahwa usia kawin muda diasosiasikan terjadi pada golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, status sosial rendah, dan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita.

Teori transisi demografi secara implisit menunjukkan bahwa penurunan fertilitas berkaitan dengan perkawinan. Pengalaman di Eropa Barat, yang merupakan asal atau sumber dari teori tersebut, menunjukkan bahwa penurunan fertilitas berjalan sejajar dengan kenaikan usia kawin. Hal itu diikuti oleh kecenderungan meningkatnya proporsi wanita yang tidak kawin. Dengan demikian, pada tahap ketika kontrasepsi belum secara luas digunakan, peningkatan usia kawin merupakan variabel penting dalam menurunkan fertilitas secara berarti. Perlu dicatat pula bahwa dalam situasi keluarga berencana yang sudah diterima secara luas, usia kawin masih memegang peranan yang cukup penting dalam penurunan angka fertilitas. Alasannya adalah bahwa peningkatan usia kawin wanita berarti memperpendek masa subur. Selama ini usaha peningkatan usia kawin di Indonesia ini menemui beberapa hambatan di samping juga adanya faktor penunjang/pendorong. Faktor penghambat tersebut antara lain adanya kesulitan dalam penyampaian informasi, tradisi yang kuat, isolasi tempat tinggal, dan masalah-masalah sosial lainnya. Faktor-faktor yang menunjang antara lain semakin majunya pendidikan, baik formal maupun nonformal, pengaruh media massa yang semakin maju, pengaruh dari para tokoh masyarakat yang telah menerima penabruhan, pemahaman program kependudukan pada masyarakat luas, dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan teori transisi demografi dapat dipahami pula bahwa perubahan fertilitas dan mortalitas mengikuti proses industrialisasi atau modernisasi. Artinya adalah bahwa perubahan fertilitas erat kaitannya dengan perubahan kondisi sosial ekonomi. Sejalan dengan perubahan yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya terjadi pula pergeseran pola perkawinan tradisional. Aspirasi orang meningkat, dan melalui pendidikan, pekerjaan, serta mobilitas orang dapat meningkatkan status sosialnya. Akibatnya adalah intervensi orang tua dalam pemilihan jodoh berkurang dan usia kawin makin tinggi, pemuda-pemudi lebih mudah bergaul dan lain-lain (Singarimbun dan Manning, 1976; Kasto, 1982 dan 1988; Muliakusuma, 1976; Singarimbun, 1991; Soeradji dan Hatmadji, 1982). Dengan kata lain, pergeseran pola usia kawin mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi. Dalam kasus ini barangkali perbedaan kondisi ekonomi antara desa dengan kota dapat dijadikan penjas terjadinya perbedaan usia kawin.

Metode Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini merupakan analisis data sekunder. Adapun data yang digunakan diambil dari Daftar Pemeriksaan Nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Di samping itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat setempat maupun petugas Kantor Urusan Agama dan Kantor Departemen Agama setempat guna memperoleh data akurat terutama

mengenai masalah yang menyangkut budaya setempat maupun hal-hal lain yang belum tercakup dalam data sekunder. Hasil analisis terhadap data ini digunakan sebagai pembanding dan diharapkan dapat memperkaya interpretasi. Sebagai gambaran umum, analisis didasarkan atas data Sensus Penduduk 1971, 1980, dan 1990.

Data dari pencatatan nikah sengaja digunakan dalam penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, belum banyak peneliti yang memanfaatkan data tersebut, terutama untuk analisis usia kawin. Kedua, data tersebut dapat menutupi kelemahan yang ada dalam data primer, terutama dalam kaitannya dengan konsistensi antara variabel usia kawin sebagai variabel terpengaruh dan variabel sosial ekonomi sebagai variabel pengaruh. Keuntungan lain dari data tersebut adalah dimungkinkannya analisis usia kawin pria yang sejauh ini sangat jarang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di tiga propinsi, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Tiga propinsi ini diharapkan mewakili tiga kultur yang berbeda, yang diperkirakan mempunyai kaitan dengan usia kawin. Propinsi Jawa Barat merupakan representasi dari etnis Sunda, Nusa Tenggara Barat mewakili Suku Sasak dan Sulawesi Selatan dari Suku Bugis. Perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya sangat sulit untuk memperoleh daerah di masing-masing propinsi yang memang benar-benar mewakili kultur masing-masing suku.

Setiap propinsi diwakili oleh dua kecamatan, yaitu kecamatan yang bercirikan desa rural dan desa urban. Kriteria desa rural dan urban

sepenuhnya didasarkan atas definisi BPS. Sampel diambil dengan cara *quota sampling*. Dari tiap propinsi diambil minimum 600 responden (300 pasangan suami istri) yang terdiri 150 pasangan dari pedesaan dan 150 pasangan dari daerah perkotaan untuk setiap tahun. Responden dipilih secara acak sederhana. Penelitian ini menggunakan data tiga tahun terakhir, yaitu 1991, 1992, dan 1993. Dengan demikian, untuk tiga propinsi akan terdapat 2700 responden. Penggunaan data tiga tahun ini diharapkan dapat untuk melihat perkembangan usia kawin setelah Sensus Penduduk 1990. Pemilihan lokasi penelitian di setiap propinsi ini sejauh mungkin terutama didasarkan pada kesamaan suku bangsa sehingga tidak ada kerancuan (bias) dalam analisis antara perbedaan daerah desa - kota dan suku bangsa yang berbeda.

Dalam analisis, variabel yang digunakan sebagai variabel terpengaruh adalah usia kawin pertama. Sementara itu, yang digunakan sebagai variabel pengaruh yaitu variabel sosial ekonomi dan budaya. Perincian variabel yang akan dikaji didasarkan pada ketersediaan data, antara lain tingkat pendidikan, tempat tinggal (kota/desa), dan pekerjaan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan tabel silang ataupun metode statistik sederhana.

Pola Usia Kawin menurut Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal

Sebagai gambaran makro di tingkat propinsi akan dibahas mengenai rata-rata usia kawin pertama di tiga

propinsi yang didasarkan pada data dari Sensus Penduduk 1971, 1980, dan 1990. Penggunaan data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran inakro mengenai pola usia kawin di daerah penelitian.

Tabel 2 memperlihatkan secara jelas bahwa rata-rata usia kawin pertama laki-laki di Sulawesi Selatan adalah paling tinggi, disusul oleh Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat, kecuali pada tahun 1990 untuk kota dan kota+desa yang menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin laki-laki di Nusa Tenggara Barat lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena pada periode 1980-1990 usia kawin pertama laki-laki di Nusa Tenggara Barat di kota mengalami penurunan, sementara di dua propinsi lainnya mengalami kenaikan. Atau dengan kata lain bahwa selama periode 1980-1990 peningkatan usia kawin laki-laki di Jawa Barat lebih cepat dibandingkan dengan di Nusa Tenggara Barat.

Hal yang sama juga terlihat untuk rata-rata usia kawin perempuan. Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai angka tertinggi dan disusul oleh Nusa Tenggara Barat dan terakhir adalah Jawa Barat. Kecuali pada tahun 1971 yang menunjukkan angka di propinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Nusa Tenggara Barat, meskipun selisihnya tidak besar. Kesimpulan lain yang bisa dilihat dari Tabel 2 adalah bahwa terjadi diferensiasi rata-rata usia kawin menurut jenis kelamin dan tempat tinggal. Terlihat dengan jelas bahwa usia kawin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Usia kawin perempuan di Jawa Barat

Tabel 2.
Rata-Rata Usia Kawin Pertama menurut Jenis Kelamin dan Lokasi (Kota/Desa)
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1971, 1980, dan 1990

Propinsi/ Jenis Kelamin	Kota			Desa			Kota+Desa		
	1971	1980	1990	1971	1980	1990	1971	1980	1990
Jawa Barat									
Pria	25,2	25,1	23,9	21,7	22,1	23,1	22,3	22,9	24,2
Wanita	20,6	20,9	22,4	17,4	17,7	16,6	17,9	16,5	20,2
NTB									
Pria	25,2	25,7	25,6	23,0	23,1	23,2	23,2	23,6	23,6
Wanita	23,5	21,1	22,7	19,1	20,1	23,5	19,2	20,3	21,0
Sulawesi Selatan									
Pria	25,3	23,5	27,6	23,2	23,7	25,2	23,6	24,5	25,9
Wanita	22,1	23,6	25,3	20,3	21,4	22,9	20,6	21,9	23,6
Indonesia									
Pria	25,7	25,9	26,9	23,4	23,5	24,4	23,9	24,1	25,3
Wanita	21,2	21,9	23,5	16,9	19,4	20,5	19,4	20,1	21,6

Keterangan: Rata-rata Usia Kawin Pertama dihitung dengan Metode Hajnal, dari hasil Sensus Penduduk 1971, 1980, dan 1990

mencapai di atas 20 baru pada tahun 1990, sementara untuk laki-laki sudah terjadi sejak tahun 1971. Di samping itu usia kawin di kota lebih tinggi dibandingkan di desa.

Hal lain yang menarik adalah bahwa ternyata Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan usia kawin yang paling lambat selama periode 1971-1990, yaitu 2,59 persen untuk laki-laki dan 9,38 persen untuk perempuan. Peningkatan yang paling cepat tercatat di Sulawesi Selatan, yaitu 14,56 persen untuk perempuan dan 8,82 untuk laki-laki, disusul oleh Jawa Barat dengan 12,85 persen untuk perempuan dan 8,52 persen untuk laki-laki. Hal ini yang keindian menyebabkan usia kawin laki-laki di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1990 lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat.

Kesimpulan bahwa Jawa Barat mempunyai angka usia kawin yang paling rendah diantara tiga propinsi juga secara implisit terlihat dari Tabel 3. Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi dengan persentase paling tinggi bagi wanita yang kawin di bawah usia 16 tahun meskipun selama periode 1980-1990 telah menunjukkan penurunan. Baik pada tahun 1980 maupun 1990 lebih dari separo wanita di Jawa Barat kawin pada usia di bawah 16 tahun (58,77 persen tahun 1980 dan 50,81 persen pada tahun 1990). Sementara itu di Nusa Tenggara Barat angkanya sangat rendah (21,44 persen tahun 1980 dan 18,62 persen pada tahun 1990). Demikian juga halnya dengan Sulawesi Selatan (30,81 persen tahun 1980 dan 24,42 persen tahun 1990). Sebaliknya persentase wanita yang

Tabel 3.
Perkawinan Pertama pada Wanita di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1980 dan 1990

Umur Kawin	Kota						Desa						Kota + Desa					
	1980			1990			1980			1990			1980			1990		
	Jabar	NTB	Sulsel	Jabar	NTB	Sulsel	Jabar	NTB	Sulsel	Jabar	NTB	Sulsel	Jabar	NTB	Sulsel	Jabar	NTB	Sulsel
< 15	17,3	5,1	10,4	14,3	4,6	7,7	24,3	4,2	8,8	22,1	2,9	5,7	23,0	4,2	8,9	19,7	3,2	6,1
15	15,4	9,5	11,6	12,3	6,8	9,5	24,3	9,0	11,5	19,4	6,0	9,4	22,6	9,0	12,9	17,2	6,1	9,4
16	12,1	8,9	9,0	11,2	9,7	8,7	13,4	8,1	9,0	15,2	9,3	9,0	13,2	8,2	9,0	14,0	9,4	8,9
17	13,4	13,7	11,6	13,0	11,8	11,4	13,2	11,6	12,8	15,5	13,3	13,3	13,3	11,9	12,6	14,7	13,1	12,9
18	10,8	14,9	10,3	10,7	13,5	10,6	8,8	15,4	10,9	10,3	14,6	12,9	9,2	15,3	12,2	10,4	14,4	12,4
19	7,0	8,8	7,9	8,6	10,5	9,4	3,6	9,6	7,5	6,0	13,0	10,2	4,2	9,5	7,5	6,8	12,6	10,1
20-21	10,5	20,2	16,5	14,0	21,3	17,9	9,8	23,5	19,9	7,6	23,8	21,5	6,8	23,0	19,4	9,6	23,4	20,8
22-24	6,3	8,9	10,1	9,6	13,4	12,7	1,8	8,7	6,3	2,4	10,5	9,5	2,6	8,7	7,0	4,7	11,0	10,2
25-29	3,4	5,9	6,9	5,0	6,4	9,3	1,1	6,4	5,3	1,0	5,3	6,5	1,6	6,4	5,6	2,3	5,5	7,1
30 +	1,1	2,2	2,4	1,1	1,7	2,7	0,5	1,9	1,9	0,2	1,1	1,8	0,6	2,0	2,0	0,5	1,2	2,0

Sumber: BPS, 1983 dan 1992.

kawin pada usia di atas 20 tahun lebih tinggi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan dibandingkan dengan di Jawa Barat. Gambaran ini sekaligus merupakan indikasi bahwa usia kawin di Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan dua propinsi lainnya.

Dibandingkan Indonesia secara umum, usia kawin laki-laki mengalami perubahan pola. Pada tahun 1971 dan 1980 di kota, misalnya, usia kawin di tiga propinsi tersebut berada di bawah Indonesia. Tetapi pada tahun 1990 usia kawin laki-laki di Sulawesi Selatan ternyata lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pencapaian angka yang lebih tinggi tersebut di desa ternyata telah dicapai oleh Sulawesi Selatan sepuluh tahun sebelumnya, yaitu tahun 1980.

Untuk perempuan polanya menjadi lain. Di kota, misalnya, Propinsi Sulawesi Selatan telah mempunyai angka yang lebih tinggi. Demikian pula halnya di desa. Perkecualiannya adalah bahwa Nusa Tenggara Barat juga mempunyai angka yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa kenaikan usia kawin di pedesaan Nusa Tenggara Barat pada periode tersebut lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa suatu gejala menarik yang menunjukkan kondisi spesifik di Jawa Barat. Di propinsi ini wanita yang kawin di bawah usia 16 tahun lebih besar di desa dibandingkan di kota. Sebagai contoh pada tahun 1980 tercatat angkanya 61,96 persen di desa dan 44,86 persen di kota. Demikian pula halnya pada tahun 1990 yang menunjukkan 56,71 persen di desa dan 37,7 persen di kota. Sebaliknya di dua propinsi lainnya

yang terjadi adalah sebaliknya. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, pada tahun 1980 persentase wanita yang kawin pada usia kurang dari 16 tahun di desa tercatat 21,19 persen dan di kota 23,47 persen. Sepuluh tahun kemudian polanya tetap sama, yaitu di desa lebih rendah (18,17 persen) dibandingkan dengan di kota (21,04 persen). Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita di desa Jawa Barat mempunyai kontribusi yang sangat tinggi terhadap rendahnya usia kawin di propinsi tersebut. Sementara itu kontribusi wanita di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan relatif lebih rendah. Dari sisi ini maka dalam rangka meningkatkan usia kawin di Jawa Barat, wanita pedesaan menjadi *target group* yang sangat penting.

Tabel 3 juga memberikan indikasi bahwa telah terjadi kenaikan usia kawin selama periode 1980-1990. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah wanita yang kawin pada usia kurang atau sama dengan 15 tahun. Penurunan yang paling tajam tercatat di Jawa Barat, yaitu dari 45,61 persen pada tahun 1980 menjadi 36,86 persen pada tahun 1990. Di Sulawesi Selatan angkanya menurun dari 21,82 persen menjadi 15,50 persen, dan di Nusa Tenggara Barat dari 13,26 persen menjadi 9,27 persen. Dari angka-angka tersebut dapat juga dilihat bahwa meskipun Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup tajam, tetapi persentase wanita yang kawin pada usia tersebut masih tinggi, yaitu lebih dari sepertiga.

Apabila dilihat penurunan berdasarkan tempat tinggal maka akan memperlihatkan hasil yang menarik.

Di semua propinsi menunjukkan bahwa penurunan persentase wanita yang kawin pada usia 15 tahun atau kurang, di desa lebih cepat dibandingkan dengan di kota. Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama adalah kemungkinan bahwa memang pada dasarnya semakin banyak wanita di desa yang kawin pada usia 15 tahun atau kurang. Kedua, tidak tertutup kemungkinan hal itu disebabkan oleh semakin banyaknya migran wanita dari desa ke kota. Di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa hal ini semata-mata dipengaruhi oleh perubahan status daerah dari desa menjadi kota selama periode 1980-1990. Kemungkinan-kemungkinan ini perlu dikaji lebih jauh secara mendalam untuk memperoleh jawaban yang lebih pasti.

Data lain juga menunjukkan adanya indikasi bahwa telah terjadi peningkatan usia kawin selama periode 1971-1980. Hal itu ditunjukkan oleh peningkatan persentase penduduk, baik laki-laki maupun wanita yang belum kawin, pada usia 15-29 (lihat tabel 4). Kenaikan tersebut terlihat lebih tinggi untuk perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat digunakan sebagai indikasi bahwa kenaikan usia kawin perempuan juga lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.

Secara umum hasil perhitungan rata-rata usia kawin pertama dari catatan perkawinan di KUA menunjukkan pola yang tidak berbeda dengan hasil sensus penduduk, yaitu bahwa usia kawin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan usia kawin di kota lebih tinggi dibandingkan di desa.

Salah satu keuntungan dalam pemanfaatan daftar pemeriksaan nikah dari KUA adalah dapat melihat langsung hubungan antara pendidikan dan usia kawin. Hal ini sangat sulit diperoleh dari data sensus penduduk maupun survai. Di pihak lain formulir di catatan sipil juga tidak menyediakan kolom pendidikan. Tabel 5 dan 6 memuat gambaran secara rinci mengenai rata-rata usia kawin laki-laki dan perempuan menurut pendidikan dan tempat tinggal.

Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa pada tahun 1991 di semua propinsi jumlah kasusnya sangat kecil. Hal ini disebabkan pada tahun 1991 hampir semua formulir yang digunakan untuk pemeriksaan pernikahan tidak mencantumkan pendidikan. Akibatnya hanya sebagian kecil yang memuat pendidikan karena menggunakan formulir baru. Dengan demikian data tahun 1991 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 1992 dan 1993. Untuk tahun 1992 dan 1993, jumlah kasus yang lebih kecil disebabkan karena terdapat calon mempelai yang tidak mengisi kolom pendidikan dalam daftar pemeriksaan pernikahan.

Dengan mengabaikan tahun, yaitu melihat total kasus selama tiga tahun, nampak adanya kecenderungan hubungan yang positif antara pendidikan dan rata-rata usia kawin laki-laki maupun perempuan. Artinya adalah semakin tinggi pendidikan semakin tinggi usia kawin. Hasil ini sekaligus dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian yang lain bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan usia kawin.

Tabel 5.
Rata-Rata Usia Kawin Pria Berdasar Tingkat Pendidikan
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1991, 1992, dan 1993

Pendidikan	Jawa Barat			NTB			Sulawesi Selatan		
	1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993
SD	22,6	23,2	23,9	23,2	23,0	23,1	23,6	22,9	23,3
SMP	23,6	23,7	23,5	24,0	23,5	23,8	20,5	22,9	24,7
SMA +	26,1	25,6	26,5	25,6	25,1	25,0	27,9	27,3	26,9
N	112	221	263	19	298	277	63	127	232

Keterangan: Diolah dari Daftar Pemeriksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

Tabel 6.
Rata-Rata Usia Kawin Wanita Berdasar Tingkat Pendidikan
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1991, 1992, dan 1993

Pendidikan	Jawa Barat			NTB			Sulawesi Selatan		
	1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993
SD	19,3	19,7	19,9	20,5	20,7	20,6	21,0	20,7	21,4
SMP	19,3	20,7	20,1	20,8	20,5	20,6	24,3	21,4	21,1
SMA +	23,1	23,8	23,5	24,3	22,5	22,1	25,5	23,4	23,7
N	106	221	263	9	318	278	49	156	245

Keterangan: Diolah dari Daftar Pemeriksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

Apabila diperinci menurut tahun memang ada beberapa pengecualian, misalnya untuk Jawa Barat, data tahun 1993 menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin pria yang berpendidikan SMP justru lebih rendah dibandingkan dengan yang berpendidikan SD ke bawah. Untuk data tahun 1991, Sulawesi Selatan menunjukkan adanya pengecualian, yaitu pria yang berpendidikan SMP mempunyai rata-rata usia kawin yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Selain kedua pengecualian tersebut, secara

umum dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan yang dicapai berpengaruh terhadap usia kawin.

Berdasarkan uraian tersebut inaka usaha untuk meningkatkan usia kawin pertama melalui pendidikan dapat dilakukan dengan mendorong penduduk untuk menempuh pendidikan sampai dengan SLP. Dalam hal ini kebijaksanaan wajib belajar (wajib) 9 tahun yang telah dicanangkan merupakan suatu hal yang tepat bila dikaitkan dengan pendewasaan usia kawin.

Rata-rata Usia Kawin menurut Pekerjaan

Usaha untuk melihat perbedaan usia kawin menurut pekerjaan mengalami kesulitan ketika akan mengklasifikasikan pekerjaan mempelai. Dari evaluasi terhadap pengisian daftar pemeriksaan nikah diperoleh kesimpulan bahwa pengisian kolom pekerjaan tidak mengacu kepada klasifikasi yang sudah standar, lapangan, jenis, atau status pekerjaan. Pada umumnya pengisiannya merupakan *mix* (campuran) dari ketiga kriteria tersebut. Akibatnya dalam membuat klasifikasi juga terkesan gado-gado.

Untuk mempermudah analisis, pertama kali pekerjaan akan dibedakan antara yang bekerja dan tidak bekerja. Kemudian dalam analisis berikutnya bagi yang bekerja dibedakan menurut sektor Pertanian, Jasa, Buruh, dan Pegawai Negeri/ABRI. Adapun yang termasuk dalam jasa sebenarnya adalah "tukang". Jadi, cirinya memang dapat dibedakan dengan pegawai negeri atau ABRI yang sebenarnya bisa masuk ke dalam Jasa.

Berdasarkan pembagian yang pertama, tampak jelas kecenderungan umum yang muncul adalah bahwa mereka yang bekerja mempunyai rata-rata usia kawin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Hal ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Perbedaan yang signifikan antara usia kawin orang yang bekerja dan tidak bekerja hanya dijumpai di Jawa Barat. Artinya adalah bahwa aktivitas seseorang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan usia kawin. Setiap usaha untuk mengatasi pengangguran di propinsi ini dengan

demikian juga akan mempunyai dampak terhadap pendewasaan usia kawin. Sementara itu di propinsi lainnya tidak signifikan.

Meskipun secara umum mereka yang bekerja mempunyai rata-rata usia kawin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak bekerja, tetapi ada kecenderungan yang bersebalikan dalam beberapa kasus. Di Jawa Barat pada tahun 1991 di desa dan tahun 1993 di kota menunjukkan bahwa laki-laki yang tidak bekerja justru mempunyai rata-rata usia kawin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja. Hal yang sama juga terjadi untuk laki-laki di desa NTB pada tahun 1991 dan 1993 serta laki-laki di desa Sulawesi Selatan pada tahun 1992. Oleh karena perbedaan yang tidak bermakna maka klasifikasi pekerjaan ini tidak mampu menjelaskan perbedaan usia kawin.

Pada pembagian yang kedua ada kecenderungan umum yang menunjukkan bahwa mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau ABRI mempunyai rata-rata usia kawin yang paling tinggi dibandingkan pekerjaan yang lain. Rata-rata usia kawin yang paling rendah ditunjukkan oleh mereka yang bekerja di sektor pertanian (lihat Tabel 7 dan 8). Rata-rata usia kawin yang tinggi bagi pegawai negeri atau ABRI mudah dipahami karena untuk memasuki pekerjaan tersebut diperlukan pendidikan tertentu, dan khusus untuk ABRI ada peraturan bahwa seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan militer perlu menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Pembagian yang lebih umum menunjukkan bahwa rata-rata usia

Tabel 7.
Rata-Rata Usia Kawin Pria Berdasar Jenis Pekerjaan
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1991, 1992, dan 1993

Jenis Pekerjaan	Jawa Barat			NTB			Sulawesi Selatan		
	1991	1992	1992	1991	1992	1993	1991	1992	1992
Tidak Bekerja	24,9	21,6	25,6	24,1	23,7	23,9	24,0	25,2	24,8
Bekerja	24,0	24,4	24,7	24,3	24,0	23,8	25,00	25,3	25,0
Pertanian	22,1	22,0	22,6	23,3	23,3	23,1	22,8	22,6	22,6
Jasa	26,0	26,7	26,6	23,6	24,7	25,5	24,5	26,1	26,2
Swasta	23,9	24,4	24,4	25,1	24,1	24,4	26,1	27,1	26,6
PN/ABRI	27,5	27,9	27,6	27,5	27,7	27,0	29,4	28,7	27,8
N	316	323	321	341	326	317	253	280	283

Keterangan: Diolah dari Daftar Pemeriksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

Tabel 8.
Rata-Rata Usia Kawin Wanita Berdasar Jenis Pekerjaan
di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, Tahun 1991, 1992, dan 1993

Jenis Pekerjaan	Jawa Barat			NTB			Sulawesi Selatan		
	1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993
Tidak Bekerja	20,2	20,5	20,4	20,9	20,9	20,9	21,6	21,8	21,4
Bekerja	21,5	22,5	22,8	21,7	21,1	20,9	24,8	26,2	27,1
Pertanian	19,0	19,0	19,0	21,2	20,7	20,6	22,1	28,7	22,7
Jasa	-	-	25,0	-	24,0	-	29,0	-	80,0
Swasta	21,4	22,1	21,5	21,7	20,9	21,1	23,4	26,5	27,4
PN/ABRI	23,7	26,1	25,9	25,5	24,9	23,4	26,5	25,4	27,3
N	321	334	319	349	347	318	251	289	280

Keterangan: Diolah dari Daftar Pemeriksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

kawin bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan non pertanian dengan perbedaan yang signifikan untuk semua propinsi dan semua tahun. Apabila pertanian dapat diidentikkan dengan "tradisional" dan "belum maju", sementara non pertanian identik dengan "modern" dan "maju" maka perbedaan ini merupakan ilustrasi dan memperkuat sinyalemen sebelumnya bahwa perubahan

sosial-ekonomi mempunyai pengaruh terhadap pendewasaan usia kawin. Pergeseran pekerjaan dari pertanian ke sektor non pertanian diharapkan juga akan mampu mendewasakan usia kawin.

Data dari Catatan Sipil menunjukkan bahwa perbedaan usia kawin pertama menurut pekerjaan mempunyai pola yang sama dengan data dari KUA, yang menunjukkan bahwa mereka yang bekerja

mempunyai rata-rata usia kawin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Sementara itu mereka yang bekerja di sektor pertanian juga mempunyai usia kawin yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang non pertanian.

Rata-rata Usia Kawin menurut Status Migrasi

Pada penelitian ini juga dicoba untuk melihat perbedaan rata-rata usia kawin menurut status migrasi. Adapun tipe migrasi yang dapat dikembangkan dari daftar pemeriksaan nikah adalah migrasi semasa hidup, yaitu penduduk yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat lahir, dengan kecamatan sebagai batasan administrasi. Dasar pemikiran untuk melakukan hal ini adalah bahwa migran pada umumnya datang dengan membawa nilai atau norma dari tempat asalnya dan dalam perilakunya masih

dipengaruhi oleh nilai dan norma tersebut. Di samping itu proses migrasi telah menyebabkan seseorang "kehilangan waktu" untuk kawin, sehingga migran akan cenderung mempunyai rata-rata usia kawin yang lebih tinggi dibandingkan dengan non migran. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan perbedaan rata-rata usia kawin migran dengan non migran. Oleh karena jumlah migran setiap tahunnya kecil maka dalam analisa tidak dibedakan menurut tahun. Hasilnya dapat diamati pada Tabel 9.

Beberapa kesimpulan dapat diperoleh dari tabel tersebut. Pola umum yang terjadi adalah bahwa rata-rata usia kawin migran lebih tinggi dibandingkan dengan non migran, baik di desa maupun di kota, laki-laki atau perempuan. Sementara itu rata-rata usia kawin migran di kota lebih tinggi dibandingkan dengan migran di desa. Kenyataan ini secara implisit

Tabel 9.
Rata-Rata Usia Kawin Migran dan NonMigran

Status	Jawa Barat			NTB			Sulawesi Selatan		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
Laki-laki									
Migran	24,84	25,49	25,18	24,87	25,34	25,16	24,81	28,92	26,73
Nonmigran	23,93	24,79	24,16	23,47	24,26	23,87	23,24	26,39	24,84
N	483	489	958	471	503	974	430	393	823
Wanita									
Migran	21,20	23,31	28,12	21,25	21,24	21,24	21,08	23,75	22,85
Nonmigran	19,85	21,59	20,69	20,93	21,06	21,00	20,84	28,55	22,06
N	481	492	973	483	526	1009	423	392	820

Sumber: Diolah dari Daftar Pomariksaan Nikah Tahun 1991, 1992, dan 1993.

merupakan indikasi bahwa mobilitas penduduk juga mempunyai andil dalam mempengaruhi usia kawin. Migrasi misalnya dalam banyak kasus bermotifkan ekonomi. Dari satu sisi barangkali hal ini juga bisa menjelaskan mengapa mereka yang bekerja mempunyai rata-rata usia kawin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak bekerja.

Analisis Regresi terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usia Kawin Pertama.

Dalam analisis ini, semua variabel independen dibuat variabel dummy, termasuk pendidikan, karena variabel ini hanya tersedia dalam ijasah yang di peroleh. Untuk variabel pekerjaan yang digunakan dalam analisis ini adalah klasifikasi bekerja dan tidak bekerja, karena klasifikasi yang lain, yaitu pertanian dan non pertanian distribusinya tidak seimbang. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Jawa Barat seluruh variabel independen yang meliputi pendidikan dengan tingkat pendidikan SLA ke atas sebagai referensi, jenis kelamin, tempat tinggal, dan pekerjaan mampu menjelaskan 37,2 persen dari variasi usia kawin pertama. Di antara variabel independen tersebut, jenis kelamin ternyata mempunyai kontribusi yang paling besar (koefisien determinasi = 21,7 persen). Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Untuk Propinsi NTB, pola yang ditemui mirip dengan di Jawa Barat. Semua variabel independen mempunyai hubungan yang linier dengan usia kawin pertama. Sumbangan

terbesar yang menjelaskan variasi usia kawin pertama ditunjukkan oleh variabel jenis kelamin (koefisien determinasi = 20,06 persen). Sisanya, yaitu 7,6 persen dijelaskan oleh variabel lainnya.

Dalam analisis regresi untuk Sulawesi Selatan, variabel pendidikan diperlakukan secara lain. Oleh karena distribusi nilai tidak seimbang maka dalam hal ini tingkat pendidikan SLP dan SLA digabung untuk dibandingkan dengan pendidikan SD. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel independen mampu menjelaskan sebesar 30,1 persen variasi usia kawin pertama di daerah tersebut. Kontribusi yang paling besar ditunjukkan oleh variabel pekerjaan yang dalam hal ini diklasifikasikan menjadi bekerja dan tidak bekerja, dengan koefisien determinasi = 14,7 persen. Hal yang menarik adalah bahwa variabel tempat tinggal mempunyai pengaruh yang hampir sama besarnya dengan variabel pekerjaan (koefisien determinasi = 13,3 persen). Baru kemudian diikuti oleh variabel pendidikan, dan jenis kelamin.

Hasil tersebut di atas memberikan ilustrasi bahwa kemungkinan besar perbedaan usia kawin pertama di Jawa Barat dan NTB yang variasinya sebagian besar dijelaskan oleh jenis kelamin merupakan indikasi masih adanya perbedaan penerimaan terhadap nilai-nilai perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat berasal dari si pelaku maupun dari keluarga. Tetapi hal ini masih harus dikaji lebih lanjut. Di pihak lain di Sulawesi Selatan, faktor tempat tinggal dan pekerjaan menjadi variabel yang penting. Berbeda dengan dua

propinsi lainnya, jenis kelamin sangat kecil pengaruhnya dalam penentuan usia kawin pertama.

Beberapa Aspek Sosial Kultural dalam Kaitannya dengan Usia Kawin

Apabila diamati dan dibandingkan maka hasil penelitian ini menyimpang dari pola yang selama ini diperoleh, yaitu bahwa Jawa Barat merupakan propinsi dengan rata-rata usia kawin yang paling rendah (lihat hasil sensus penduduk, SPI 1987 dan SDKI 1991). Ada kecenderungan bahwa di antara tiga propinsi yang diteliti justru NTB yang mempunyai angka paling rendah. Dengan mendasarkan pada pikiran semula bahwa ketiga propinsi tersebut mewakili kultur yang berbeda maka pembahasan berikut ini lebih ditekankan pada hal tersebut.

Rata-rata usia kawin pertama yang tergolong rendah di NTB, salah satu faktor yang sangat berperan adalah budaya kawin lari. Menurut beberapa sumber, lebih dari 90 persen masyarakat Suku Sasak inasih melakukan adat ini. Istilah kawin lari di sini diartikan bahwa sebelum mempelai resmi menikah, terlebih dahulu pihak laki-laki melarikan calon mempelai wanita, dibawa ke rumah pihak keluarganya.

Dalam peristiwa kawin lari, biasanya pihak keluarga perempuan tahu atau bahkan diberitahu sebelumnya oleh calon mempelai bahwa nanti malam anak perempuannya akan dibawa lari atau dicuri oleh pacarnya, sehingga kadang-kadang pihak keluarga juga turut mempersiapkan baju atau peralatan yang akan dibawa. Biasanya setelah kejadian pada

malam pencurian itu, pihak keluarga perempuan mengadukan pada aparat desa atau wilayahnya, bahwa anak perempuannya hilang (dibawa/dicuri orang). Hal ini dilakukan agar tersiar kabar di masyarakat bahwa anak perempuannya hilang/dilarikan, sehingga tidak ditanggapi serius sebagaimana peristiwa pencurian yang sesungguhnya. Kawin lari hanya sebagai formalitas dalam rangkaian adat kebiasaan/budaya setempat.

Selang dua sampai tiga hari kemudian, ada utusan dari pihak laki-laki (yang mencuri/melarikan), biasanya kepala adat atau kepala dusun bertindak sebagai perantara untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan (kadang-kadang juga terlebih dahulu memberi tahu pada aparat desa ataupun dusun tempat pihak perempuan tinggal) bahwa ada anak perempuan berasal dari wilayah tersebut yang sudah beberapa hari tinggal di wilayahnya. Setelah itu diadakan perundingan untuk membicarakan kapan waktu untuk pelanaran (sorong serah) ataupun hari pernikahan sebaiknya diadakan. Jika si penuda melarikan gadis lebih dari 3 hari dan belum juga datang kepada keluarga pihak wanita, maka hal itu dianggap sebagai tindak kriminal atau penculikan dan akan diselesaikan dengan melibatkan pihak keamanan ataupun pihak kepolisian.

Dalam pelarian atau selama berada di rumah calon pengantin laki-laki, calon pengantin tersebut umumnya tidak melakukan hubungan suami-istri, sampai mereka resmi menikah di KUA. Perkawinan masih dianggap sesuatu yang sakral, sehingga masyarakat masih takut melanggar

peraturan atau berbuat hal yang akan menodai perkawinan itu sendiri, sehingga kasus hamil di luar nikah (sebelum menikah) sangat jarang dijumpai.

Budaya kawin lari ini terjadi karena cara normal melamar gadis untuk dijadikan istri tidak bisa ditepuh. Masyarakat Suku Sasak merasa sangat tersinggung dan terhina jika anak gadisnya dilamar, apalagi jika barang ataupun uang yang diberikan pada saat pelamaran (*peningset*) itu sedikit nilainya. Mereka merasa anaknya dianggap sebagai binatang atau barang yang bisa dengan mudah dibeli atau ditukar dengan barang atau uang. Sebaliknya orang tua lebih bangga kalau anaknya dicuri atau dilarikan daripada dibayar ataupun diminta. Dengan demikian budaya kawin lari ini tidak dianggap sebagai hal yang memalukan ataupun menimbulkan masalah, namun lebih dianggap sebagai hal yang dapat meningkatkan derajat keluarga.

Kawin lari ini terjadi bukan karena salah satu atau kedua pihak keluarga tidak setuju, namun hal itu dilakukan justru untuk menjaga kehormatan keluarga mereka. Jika anak telah dibawa lari, mereka punya alasan untuk segera menikahkan anaknya. Hal semacam ini sedikit banyak berperan dalam menentukan rata-rata usia kawin. Gadis yang sudah terlanjur dilarikan oleh pacarnya harus segera dikawinkan sebab jika tidak hal itu akan mempermalukan keluarga.

Selain adat kawin lari, rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan berpengaruh juga terhadap rendahnya rata-rata usia kawin. Di kebanyakan daerah pedesaan

pendidikan masih dianggap sebagai suatu hal yang kurang penting, khususnya bagi perempuan. Pendidikan anak-anak perempuan di wilayah tersebut umumnya hanya tamat SD atau SMP saja. Minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi juga belum begitu tinggi, meskipun sebetulnya dari segi ekonomi mereka mampu.

Rata-rata usia kawin yang relatif tinggi di Jawa Barat tampaknya merupakan akibat dari bergesernya pandangan-pandangan lama mengenai usia kawin dan perkawinan, sehingga dukungan terhadap usia kawin muda tidak sebesar dahulu. Perkawinan di bawah 20 tahun biasanya dilakukan oleh perempuan dengan tingkat pendidikan rendah (biasanya lulusan SD), yang kemudian bekerja sebagai karyawan pabrik atau karyawan toko. Sedangkan perempuan yang melanjutkan sekolah sampai Perguruan Tinggi biasanya menikah pada usia di atas 20 tahun. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya usia kawin muda pada suku Sunda (terutama di daerah pedesaan/pedalaman) kecuali faktor pendidikan (karena kurang tersedianya sarana pendidikan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terutama orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat yang lebih tinggi) juga faktor ekonomi. Sebagian orang tua mendorong anaknya (perempuan) untuk segera menikah dengan maksud mengurangi beban orang tua, karena bila anaknya sudah menikah (terutama dengan laki-laki yang sudah bekerja) otomatis menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga ada kalanya pihak orang tua menjodohkan anak

perempuannya sedini mungkin dengan laki-laki pilihan mereka. Perjodohan ini kadang dilakukan ketika anak-anak mereka masih kanak-kanak. Hal ini lebih sering terjadi beberapa tahun silam dan di daerah pedesaan karena belum ada peraturan wajib belajar dari pemerintah.

Penjelasan yang lain dapat diberikan untuk Sulawesi Selatan yang mempunyai rata-rata usia kawin tinggi. Secara umum di propinsi Sulawesi Selatan terdapat 4 etnik yang dianggap dominan yaitu: Bugis, Makasar, Mandar dan Toraja. Secara kultural keempat suku tersebut dibedakan menjadi dua yaitu suku Bugis, Makasar dan Mandar di satu sisi dengan suku Toraja di sisi lain. Kategorisasi semacam itu muncul berkaitan dengan perbedaan kebudayaan mereka, suku Toraja lebih didominasi oleh budaya lokal yang dikaitkan dengan Agama Kristen, sedangkan tiga suku yang lain erat berkaitan dengan Agama Islam.

Dalam pencarian jodoh, terdapat perbedaan yang cukup besar antara masyarakat Bugis pedesaan dengan masyarakat Bugis perkotaan. Masyarakat Bugis pedesaan umumnya masih menerapkan aturan pencarian jodoh seperti yang telah berkembang sejak awal, walaupun dalam beberapa hal sudah mengalami perubahan, namun untuk masyarakat perkotaan gejala semacam itu sudah mulai ditinggalkan.

Dalam pencarian jodoh, masyarakat Bugis memandang bahwa perkawinan yang ideal adalah: (1) perkawinan yang disebut *assialang marola* ialah antara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu, (2) *assialanna memang*

adalah perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua, baik dari pihak ayah maupun ibu, (3) *ripaddeppe mabelae* adalah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga dari pihak ayah maupun ibu.

Walaupun beberapa model perkawinan tersebut di atas dianggap ideal namun pada kenyataannya saat ini tidak banyak dipakai dalam pencarian jodoh terutama di kalangan masyarakat luas, khususnya pada masyarakat perkotaan. Cukup banyak di antara mereka yang melakukan perkawinan dengan suku bangsa lain, baik di dalam lingkungan Sulawesi Selatan maupun di luarnya.

Kesimpulan

Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin di daerah penelitian tidak menyimpang jauh dari hasil perhitungan dengan menggunakan Sensus Penduduk 1990. Hal ini merupakan indikasi bahwa daftar pemeriksaan nikah dari KUA dapat digunakan sebagai sumber data untuk studi usia kawin. Nilai kemanfaatannya akan jauh lebih tinggi apabila dilakukan peningkatan kualitas data.

Secara umum usia kawin pertama menurut jenis kelamin dan tempat tinggal menunjukkan pola yang konsisten dengan hasil dari sensus penduduk maupun survai, yaitu bahwa laki-laki mempunyai angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Demikian pula halnya bahwa rata-rata usia kawin pertama di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Meskipun demikian variasi rata-rata usia kawin menurut propinsi

memperlihatkan bahwa Jawa Barat bukan propinsi yang mempunyai angka yang paling rendah sebagaimana ditunjukkan oleh sensus penduduk ataupun survai. Justru Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi dengan angka yang terendah.

Penjelasan mengenai hal ini barangkali bersumber pada pemilihan daerah penelitian. Pada penelitian ini daerah penelitian tidak bisa mewakili kondisi propinsi secara umum. Hasil ini sekaligus merupakan indikasi bahwa terjadi variasi rata-rata usia kawin pertama di dalam satu propinsi. Tidak tertutup kemungkinan apabila daerah penelitian yang digunakan adalah daerah dengan kultur yang *mix* hasilnya akan lain. Variasi rata-rata usia kawin tersebut penting untuk diperhatikan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pendewasaan usia kawin.

Dari analisis regresi diperoleh gambaran bahwa variabel yang mempunyai kontribusi terbesar dalam menjelaskan variasi usia kawin pertama, berbeda antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat di satu pihak dengan Sulawesi Selatan di pihak yang lain. Oleh karena justru variabel jenis kelamin yang mempunyai kontribusi terbesar di dua propinsi yang pertama, maka akan sangat sulit apabila intervensi dilakukan didasarkan pada

hasil ini. Di pihak lain faktor pekerjaan dan tempat tinggal merupakan faktor yang dapat diintervensi oleh pemerintah.

Dari segi sosial budaya, perbedaan rata-rata usia kawin menurut propinsi tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Usia kawin yang rendah di NTB mungkin berkaitan erat dengan budaya kawin lari yang menurut informasi masih dilaksanakan oleh suku sasak sampai saat ini. Sementara itu tingginya usia kawin di Sulawesi Selatan berkaitan erat dengan proses perkawinan yang bermuara pada tingginya maskawin yang harus disediakan. Ini terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa nilai maskawin yang dibayarkan di Sulawesi Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua propinsi lainnya. Dari satu sisi mekanisme ini tidak hanya berkait dengan masalah sosial budaya tetapi juga ekonomi. Diperoleh informasi bahwa nilai-nilai budaya yang dahulu berlaku di dalam masyarakat Jawa Barat sudah mulai bergeser, sehingga perkawinan usia muda bukan lagi menjadi kecenderungan yang umum. Tampaknya hal ini terkait erat dengan semakin terbukanya informasi, terutama dilihat dari lokasinya yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan.

Referensi

- Bloom, David E and P.H. Reddy. 1984. *Age Patterns of Women at Marriage, Cohabitation, and First Birth in India*. Cambridge: Center for Population Studies, Harvard University.
- Davis, Kingsley and Judith Blake. 1956. "Social structure and fertility: an analytical framework", *Economic Development and Cultural Change*, 4(3): 211-235.
- Dixon, Rutg B. 1971. "Explaining cross culture variation in age at marriage and proportions never marrying", *Population Studies*, 25(2): 215-233.
- Biro Pusat Statistik. 1980. *Pola Umur Perkawinan*. Jakarta.
- . 1991. *Analisa Ringkas Hasil Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- . 1993. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 1992*. Jakarta.
- Kasto. 1982. *Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- . 1988. *Perbedaan Usia Perkawinan Pertama Berdasarkan Faktor Sosial-Ekonomi dan Daerah*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan Biro Pusat Statistik.
- Muliakusuma, Sutarsih. 1976. *Beberapa Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Singarimbun, Masri. 1987. "Perkawinan pada Masyarakat Jawa", in *makalah Pertemuan Ilmiah Pola Perkawinan*, Bandung, Lembaga Penelitian UNPAD, 18 Juli 1987.
- . 1991. "Perkawinan pada masyarakat Jawa", *Majalah Demografi Indonesia*, XVIII, 35: 27-43.
- Singarimbun, Masri dan Chris Manning. 1974. "Marriage and divorce in Mojolama". *Indonesia*, 17: 67-82.
- . 1976. *Fertility and Family Planning in Mojolama*. Yogyakarta: Population Institute, Gadjah Mada University.
- Soeradji, Budi dan Sri Harjati Hatmadji. 1982. *Perbedaan Umur Perkawinan Antar Daerah*. Jakarta: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wirosuhardjo, Kartomo. 1987. "Kebijaksanaan kependudukan di Indonesia menjelang Pelita V dalam kaitannya dengan pola perkawinan", *makalah Pertemuan Ilmiah Pola Perkawinan*, Bandung; Lembaga Penelitian UNPAD, 18 Juli 1987.